

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA  
KASERALAU KECAMATAN BATULAPPAKABUPATEN  
PINRANG**

**NURHIDAYAH  
10561 04032 11**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang** syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018.

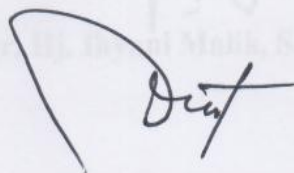
Nama Mahasiswa : **Nurhidayah**

Nomor Stambuk : **105610 4032 11**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

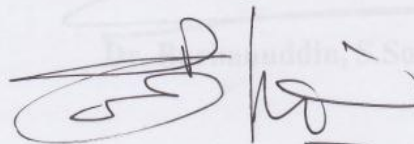
Menyetujui :

Pembimbing I



**Prof. Dr. Alyas, M.S**

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Tahir, M.Si**

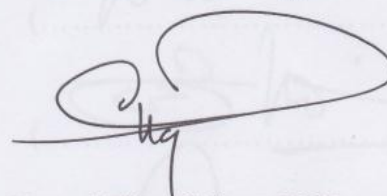
Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



**Nasrul Haq, S.Sos., M.Pa**

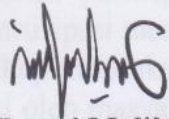
## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1347/FSP/A.1-VIII/VIII/1439/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

## TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.**



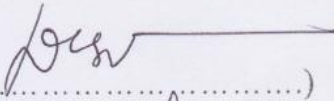
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

## Penguji:

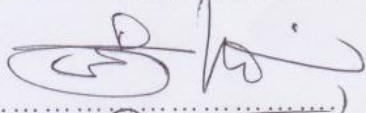
1. Prof. Dr. Alyas, M.S. (Ketua)

  
(.....)

2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si.

  
(.....)

3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si.

  
(.....)

4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.

  
(.....)

## ABSTRAK

**Nurhidayah. Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.** Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh alyas dan Muhammad Tahir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Kepala Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian adalah penelitian *Kualitatif* dengan tipe penelitian adalah *Deskriptif*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, *observasi* dan dokumentasi 6 orang informan yang ditetapkan secara *Purposive*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa Kaseralau dirasakan cukup baik, dimana kepala desa banyak menggunakan kepemimpinan demokratis. Berbagai pembinaan dan saran senantiasa diberikan kepada masyarakat. Selain itu sikap demokratis kepala desa dirasakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Adapun Bentuk partisipasi merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap proses pembangunan yang ditunjukkan melalui partisipasi oleh masyarakat. Tetapi masyarakat masih sedikit yang peduli dengan sekitarnya bahkan masyarakat tidak tergerak untuk terlibat pada pembangunan di desa. sehingga masyarakat jarang terlibat dalam kegiatan seperti musyawarah.

Kata kunci: Kepemimpinan, partisipasi, pembangunan desa.

## KATA PENGANTAR



*“Alhamdulillahillazi nahmaduhu wanasta’inuh wanastagfiruhu wana’uzubillahi minsuruuri anfusinaa man yahdillah falamudillalah waman yudlil falahadiyalah”.* Tak ada kata ataupun kalimat yang pantas terucap selain ungkapan syukur Alhamdulillah Robbil Alamin, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan penulisannya, meskipun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Alyas.M.S sebagai pembimbing I dan sebagai pembimbing II Dr. Muhammad Tahir, M. Si, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ; Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar DR. Rahman Rahim, MM. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin, S. Sos., M.Si yang telah membina jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

Kepada orang tuadan teman-teman tercinta serta orang-orang yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar penulis tak pernah berputus asa dalam menghadapi kemelut hidup dan selalu mengingatkan agar senantiasa berdoa kepada Sang Pencipta.

Semoga bantuan semua pihak bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Rabbil Alamin.Amin...

Makassar, 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR .....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Tinjauan Kepemimpinan .....	8
2. Syarat-syarat Kepemimpinan .....	11
3. Sifat-sifat Kepemimpinan.....	13
4. Ciri-ciri seorang pemimpin yang berhasil .....	16
5. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	19
6. Bentuk Partisipasi .....	24
7. Partisipasi Masyarakat dan Program Pembangunan.....	36
8. Konsep Pembangunan .....	41
B. Kerangka Pikir.....	47
C. Fokus Penelitian .....	48
BAB III. METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	50
C. Informan Penelitian .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Jenis Dan Sumber Data .....	52
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Pengabsahan Data .....	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
B. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang .....	62
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang .....	68
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan salah satu wujud keinginan untuk maju dan mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta meningkatkan kehidupan penduduk dan penyelenggaraan Negara yang memajukan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai perkembangan dan kemajuan taraf hidup, yang meliputi terpenuhinya keamanan, ketentraman, dan keadilan serta adanya jaminan kebebasan mengeluarkan berpendapat dengan pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan hasil – hasilnya harus dapat meningkatkan mutu kehidupan serta kesejahteraan hidup seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan seimbang, maka dapat menggerakkan masyarakat untuk membangun dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Namun fakta dilapangan saat ini menunjukkan bahwa suatu pembangunan dari masyarakat di pedesaan masih banyak menghadapi kesulitan dan kendala yang disebabkan oleh terbatasnya pendanaan dan SDM belum berkompetensi untuk mengelola daerah pedesaan, sehingga pembangunan desa memerlukan bantuan dari pemerintah. Dengan keadaan demikian maka inisiatif dan partisipasi penduduk pedesaan menjadi sangat penting dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, maka aparat desa diharapkan mampu mewujudkan perkembangan desa dapat dilakukan dengan bersama-sama. Dalam rangka

Program pemberdayaan desa secara partisipasi, di desa di bentuk Lembaga Kemasyarakatan yang bertugas dalam meringankan pemerintah desa yang merupakan rekan dalam pembangunan masyarakat, dan berfungsi antara lain menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif, dan sebagai tempat masyarakat ikut serta untuk mewujudkan program dan kegiatan pembangunan desa untuk terwujud secara demokrasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat.

Desa Kaseralau Batulappa adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Pinrang. Pembangunan Desa memang pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan yang berlanjut serta perkembangan yang lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, Sebagai mana di Desa lainnya, pemerintah desa dan masyarakat desa di wilayah Desa Kaseralau Batulappa Kabupaten Pinrang juga sedang melaksanakan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan oleh aparat desa dan penduduk desa dengan tekad yang kuat untuk saling membantu dan memberdayakan kearifan lokal dan SDA pedesaan. Pelaksanaan perencanaan untuk desa selanjutnya akan di sampaikan kepada pemerintah desa dan digabungkan dengan program pemberdayaan desa. Masyarakat desa berhak mengetahui dan ikut terlibat dalam pelaksanaan perencanaan dan realisasi pembangunan desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pola cara memimpin kepala desa adalah salah satu kunci yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam

menentukan kebijakan dalam pembangunan di desa. Kepala desa melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, tanggungjawabnya, untuk menata dan mengelola desa serta penyelenggara dan sebagai orang yang bertanggung jawab pada pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Di dalam melaksanakan tugasnya, tanggungjawabnya sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa itu dibantu oleh aparat desa yang meliputi sekretariat desa sebagai pembantu desa dan kepala dusun sebagai orang yang merealisasikan tugas kepala desa dalam wilayah kerja tertentu.

Kepemimpinan yang efektif menurut Blake (dalam Nawawi, 2003:83) bahwa pemimpin mampu mengaktifkan organisasi untuk mencapai tujuannya dapat diwujudkan dengan kombinasi perilaku atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan pada bawahan atau orang. Pihak yang dipimpin atau masyarakat juga harus berperan aktif.

Selain interaksi kepala desa dengan masyarakat, kepemimpinan juga dipengaruhi oleh elemen lingkungan dan situasional kepemimpinan itu berlangsung, terutama perangkat nilai budaya yang menjiwai kehidupan organisasi dan masyarakat dalam segala kegiatannya. Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah.

Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat

akandianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan.

Pembangunan wilayah pedesaan bertujuan pada perkembangan ekonomi masyarakat desa sebagai usaha mempercepat pembangunan desa melalui ketersediaan sarana dan prasarana agar terbangun pembangunan perekonomian daerah yang efektif. Pembangunan dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Segala bidang dan aspek hidup penduduk dalam berkembang menghadapi bermacam-macam perubahan baik perubahan kecil sehingga yang terbesar.

Keseluruhan itu merupakan wujud cita-cita masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan disadari pada dasarnya di masyarakat dan di akhir memang dimaksudkan untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak mampu menjalankan pemberdayaan secara sendiri, tetapi masyarakat dapat diarahkan dan dikontrol oleh pemerintah dengan tujuan tidak terjadi kesalahan, penyelewengan, dan tumpang tindih dalam pembangunan.

Pemerintah desa sebagai wakil dari masyarakat berfungsi melaksanakan tugas pemerintahan, pemberdayaan, dan mewujudkan hidup yang aman, tentram di desa. Guna menjalankan perannya secara tepat dan benar, pemerintahan desa (kepala desa) penting untuk dimajukan mengikuti perkembangan penduduk desa dan wilayah sekitar. Dengan perkataan lain, perkembangan social yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan.

Sesuai konteks dalam pembangunan, keterlibatan penduduk desa merupakan bagian dari berjalannya pembangunan desa, dengan demikian keikutsertaan penduduk desa dalam pembangunan penting diutamakan oleh aparat pemerintahan pedesaan, dengan demikian adanya partisipasi pemerintah desa cukup memiliki kemungkinan masyarakat akan merasa diperhatikan atau memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan keikutsertaan penduduk desa merupakan bagian dari tujuan pembangunan desa Kaseralau.

Meningkatnya tingkat partisipasi warga Desa Kaseralau Batulappa tersebut tidak terlepas dari pengaruh kepala desa itu sendiri. Menurut Rivai (2003:21), kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya para anggota kelompok. Kepemimpinan kepala desa partisipatif adalah seseorang pimpinan yang melibatkan elemen-elemen pembantu pemerintahan untuk pengambilan keputusan. Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis (Yukl, 1998:102).

Kepemimpinan Kepala Desa Kaseralau Batulappa yang saat ini menjabat berbeda dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dari sebelum dan sesudah kepala desa yang baru menggantikan posisi kepala desa sebelumnya hal ini terlihat dari hasil kepemimpinannya selama menjabat pada masa peralihan kepemimpinan yang baru.

Adanya perbedaan karakter dan pemikiran dari pemimpin sebelum mencerminkan tingkat keaktifan masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa. Dimana pada saat kepemimpinan desa yang sebelumnya, masyarakat terlihat kurang antusias ikut serta, sedangkan kepala desa yang baru banyak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengembangan wilayah desa. Salah satu keikutsertaan penduduk desa dalam kegiatan pembangunan desa yakni adanya campur tangan masyarakat dalam mengusulkan program-program apa saja yang dibutuhkan desa dan fasilitas apa saja yang masyarakat butuhkan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dan uraian teori, bahwa peran serta penduduk desa terhadap pembangunan berhubungan dengan beberapa hal yaitu: cara memimpin kepala desa, pengetahuan masyarakat, kemakmuran masyarakat dan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan gambaran fenomena tersebut atas, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi Kepala Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Partisipasi Kepala Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Partisipasi Kepala Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara.

##### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat, khususnya bagi Instansi Pemerintah yang mengenai pembangunan desa menjadi lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Tinjauan Kepemimpinan**

Setiap komunitas atau organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang menjalankan kegiatan kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kelompoknya dengan kata lain seorang pemimpin membutuhkan anggotanya untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Rivai (2003:30), pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pemimpin tidak bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasinya, tetapi harus dibantu orang lain dalam hal ini anggotanya, untuk itu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya sehingga menghasilkan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain pemimpin harus menyatu dengan bawahan namun wibawa sebagai seorang pemimpin harus tetap dijaga. Aktualisasi seorang pemimpin adalah menciptakan suasana dan pola kepemimpinan dan diharapkan para bawahan.

Mengenai sebab-sebab munculnya seorang pemimpin para ahli telah menemukan beberapa teori Kartono (2010:29) mengatakan ada tiga teori dalam menjelaskan kemunculan pemimpin yaitu:



- a. Teori Genetis, teori ini menyatakan pertama, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Kedua, dia digariskan untuk memimpin untuk kondisi yang bagaimanapun juga;
- b. Teori sosial, teori ini menyatakan pertama, pemimpin itu harus dipersiapkan, didik dan dibentuk, tidak langsung menjadi pemimpin. Kedua, setiap orang mampu terlahir sebagai pemimpin, jika mengupayakannya sendiri dengan usahanya sendiri;
- c. Teori ekologis, teori ini muncul atas respon berdasar kedua pendapat diatas yaitu seseorang akan sukses menjadipemimpin apabila sejak lahir dia telah mempunyai bakat kepemimpinan dan bakat ini selanjutnya dikembangkan melalui belajar dari pengalaman dan usaha pendidikan, yang juga memperhatikan tuntutan lingkungan/ekologisnya;

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan bermacam-macam karena perbedaan kebutuhan ini maka manusia saling membutuhkan sehingga diperlukan kerjasama yang melahirkan suatu wadah atau tempat berkumpul maka terciptalah suatu komunitas atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama.

Kreith dan Knicki (Nawawi, 2003:21) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela. Pengertian ini menitik beratkan pada kemampuan seorang pimpinan dengan tidak memaksa dalam menggerakkan elemen organisasi agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan

organisasi. Artinya seorang pimpinan harus mampu menjadi suri tauladan yang baik agar tanpa adanya unsur pemaksaan atau intimidasi anggotanya akan mengikutinya.

Soerjono Soekanto (2011: 318) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Ashar (2012:166) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang penting bagi manajer. Para manajer merupakan pemimpin dalam organisasi, sebaliknya pemimpin tidak perlu menjadi manajer. Sudarwan Danim (2014:10) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arahan kepada individu atau kelompok lainnya yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

Gibson (Nawawi,2003: 21), mengatakan kepemimpinan merupakan usaha menggunakan segala macam pengaruh yang merupakan keinginan

sendiri untuk memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah usaha seorang pemimpin untuk dapat membangkitkan rasa percaya diri anggotanya untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan sukarela pada tujuan tertentu.

Menurut Rivai (2003:21), kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan memberikan pengaruh pada kegiatan yang ada berhubungan dengan pekerjaan semua anggota kelompok. Tiga aplikasi penting dalam kepemimpinan yaitu:

- a. Kepemimpinan itu menghubungkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut;
- b. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang;
- c. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta berkualitas.

Dari pengertian para ahli di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi seseorang atau kelompok sehingga sasaran yang dicita-citakan dapat tercapai.

## **2. Syarat-syarat Kepemimpinan**

Kartini Kartono (2013: 36) mengungkapkan bahwa konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
- b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu “Mbawani” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Dari pengertian diatas kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok antara lain:

- a. Kepemimpinan melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi.
- b. Dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin.
- c. Adanya tujuan bersama yang harus dicapai.

Asta Brata (Soerjono Soekanto, 2011: 322) menyatakan kepemimpinan yang akan berhasil, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Indra-brata, yang memberikan kesenangan jasmani.
- b. Yama-brata, yang menunjukkan pada keahlian dalam kepastian hukum.
- c. Surya-brata, yang menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja persuasion.

- d. Caci-brata, yang memberikan kesenangan rohani.
- e. Bayu-brata, yang menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran pengikut-pengikutnya.
- f. Dhana-brata, menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati.
- g. Paca-brata, yang menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian dan keterampilan.
- h. Agni-brata, yaitu sifat memberikan semangat kepada anak buah.

### **3. Sifat-sifat Kepemimpinan**

Ngalim Purwanto (2012: 55) mengemukakan bahwa ada 6 sifat yang diperlukan dalam kepemimpinan pendidikan adalah sebagai berikut.

#### **a. Rendah Hati dan Sederhana**

Seorang pemimpin pendidikan hendaknya jangan mempunyai sikap sombong atau merasa lebih mengetahui daripada yang lain. Hendaknya lebih banyak mendengarkan dan bertanya daripada berkata dan menyuruh. Kelebihan pengetahuan dan kelebihan kesanggupan yang dimiliki hendaknya dipergunakan untuk membantu yang lain atau anak buah, bukan untuk dipamerkan dan dijadikan kebanggaan.

#### **b. Bersifat Suka Menolong**

Pemimpin hendaknya selalu siap sedia untuk membantu anggota-anggotanya tanpa diminta bantuannya. Akan tetapi, bantuan yang diberikan jangan sampai dirasakan sebagai paksaan sehingga orang yang memerlukan bantuan itu justru menolaknya meskipun sangat memerlukannya. Demikian pula seseorang pemimpin hendaknya selalu bersedia untuk mendengarkan

kesulitan-kesulitan yang disampaikan oleh anggota-anggotanya meskipun mungkin tidak akan dapat menolongnya. Hal ini sangat penting untuk mempertebal kepercayaan anggota-anggotanya bahwa benar-benar tempat perlindungan dan pembimbing mereka.

c. Sabar dan Memiliki Kestabilan Emosi

Seorang pemimpin pendidikan hendaklah memiliki sifat sabar. Jangan lekas merasa kecewa dan memperlihatkan kekecewaannya dalam menghadapi kegagalan atau kesukaran, dan sebaliknya, jangan lekas merasa bangga dan sombong jika kelompoknya berhasil. Sifat ini akan memberikan perasaan aman kepada anggota-anggotanya. Mereka tidak merasa dipaksa, ditekan, atau selalu dikejar-kejar dalam menjalankan tugasnya. Mereka bebas membicarakan persoalan-persoalan di antara mereka sendiri dan dengan pemimpinnya.

d. Percaya pada Diri Sendiri

Seorang pemimpin hendaknya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada anggota-anggota; percaya bahwa mereka akan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, yang dipimpin harus merasa pula bahwa mereka mendapat kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kepercayaan pemimpin seperti itu hanya timbul atau ada pada diri seorang pemimpin yang mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada diri sendiri; percaya pada kesanggupan sendiri. Karena percaya kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, tidak memerlukan pengawasan atas diri untuk

melakukan apa yang telah diterima sebagai tugas dan tidak merasa perlu untuk selalu mengawasi anggota-anggota kelompok.

e. Jujur, Adil, dan Dapat Dipercaya

Sikap percaya kepada diri sendiri pada anggota-anggota kelompok dapat timbul karena adanya kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya. Karena mereka menaruh kepercayaan kepada pemimpin, maka akan menjalankan semua kewajiban dengan rasa patuh dan bertanggung jawab. Untuk menimbulkan sikap patuh yang demikian, pemimpin harus patuh pula pada diri sendiri; selalu menepati janji, tidak lekas mengubah haluan, hati-hati dalam mengambil putusan dan teliti dalam melaksanakannya, berani mengakui kesalahan dan kekurangan sendiri, dan sebagainya. Dengan kata lain pemimpin hendaknya jujur, adil, dan dapat dipercaya. Pemimpin hendaklah konsekuen terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri selalu berusaha agar sikap dan tindakan tidak bertentangan dengan perkataan, menjaga satu kata dengan perbuatan

f. Keahlian dalam Jabatan

Untuk melaksanakan kepemimpinan, disamping sifat-sifat yang telah diuraikan tadi, harus pula didasarkan atas keahlian, yakni keahlian dalam bidang pekerjaan yang dipimpin. Bagaimanapun besarnya kesediaan untuk membantu kelompok dalam kesulitan-kesulitan pekerjaan, tanpa mempunyai keahlian dalam bidang pekerjaan itu tidak mungkin dapat memberi bantuan.

#### 4. Ciri-ciri seorang pemimpin yang berhasil

De Bono (Ashar, 2012: 174) menyatakan bahwa ada empat macam faktor (dua ciri pribadi dan dua lainnya merupakan faktor di luar dirinya) yang menentukan keberhasilan seseorang atau sekelompok orang. Kedua ciri pribadi adalah sebagai berikut.

- a. *A little madness*, orang yang tahu dengan pasti dan jelas apa yang ia inginkan dan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mencapai tujuan.
- b. *Very talented*, orang yang mempunyai bakat yang sangat menonjol di bidang tertentu.

Kedua faktor lainnya adalah sebagai berikut.

- a. *Rapid growth field*. Orang yang bekerja dalam bidang yang berkembang sangat cepat mempunyai peluang lebih banyak untuk berhasil, daripada orang yang bekerja di bidang yang tidak dapat berkembang dengan cepat.
- b. *Luck*. Ada orang yang kebetulan berada di tempat pada saat yang tepat untuk melakukan usahanya. Ada orang lain yang selalu kesulitan dalam memulai usahanya.

#### 5. Tipologi Kepemimpinan

Ronald Lippit dan Ralph K. White (Soekarso, 2010, 100-104): dalam studinya berpendapat dan mengemukakan adanya tiga gaya kepemimpinan :

- a. Kepemimpinan gaya otoriter, otokratis, atau diktator

Kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan



yang akan dilakukan oleh pimpinan semata-mata. Kepemimpinan gaya otoriter antara lain berciri:

- 1) Wewenang mutlak berpusat pada pimpinan
- 2) Keputusan selalu dibuat oleh pimpinan
- 3) Kebijaksanaan selalu dibuat oleh pimpinan
- 4) Komunikasi langsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan
- 5) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat
- 6) Prakarsa harus selalu datang dari pimpinan
- 7) Tiada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat
- 8) Tugas-tugas bagi bawahan diberikan secara instruktif
- 9) Lebih banyak kritik daripada pujian
- 10) Pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat
- 11) Cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman
- 12) Kasar dalam bertindak
- 13) Kaku dalam bersikap
- 14) Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pimpinan
- 15) Wewenang mutlak berpusat pada pimpinan

b. Kepemimpinan gaya demokratis

Kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan.

Kepemimpinan gaya demokratis antara lain berciri (Ngalim Purwanto, 2012: 55):

- 1) Wewenang pimpinan tidak mutlak
- 2) Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan
- 3) Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
- 4) Kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
- 5) Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antar sesama bawahan
- 6) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar
- 7) Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan
- 8) Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, atau pendapat
- 9) Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan daripada instruktif
- 10) Pujian dan kritik keseimbangan
- 11) Pimpinan mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing
- 12) Pimpinan meminta kesetiaan para bawahan secara wajar
- 13) Pimpinan memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak
- 14) Terdapat suasana saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai

- 15) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawahan.

## **6. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Pengertian yang secara umum dapat diterima dari istilah partisipasi ialah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilaksanakan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara perorangan yang berhubungan dengan anggota masyarakat yang lain menurut Rahardjo (Krisnha S. Andini dkk, 2014:196)

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) ialah keikutsertaan masyarakat dalam proses penidnifikasian persoalan dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternative penyelesaian untuk mengenai masalah, pelaksanaan usaha mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses menevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi merupakan jalan yang paling efektif untuk mengembangkan yang bermamfaat kemampuan masyarakat untuk proses program pembangunan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan apa yang di miliki masyarakat terhadap agenda pemerintah,permasyarakatan dan pembangunan.

Mubyarto (dalam Ndaraha, 1987:102) menefenisikan partisipasi sebagai kesangupan untuk membantu pendapatanya setiap orang tanpa berarti memberikan kepentingan diri sendiri partisipasi mengeluarkan harapan diri dan kemampuan seseorang untuk turut serta dalamn memutuskan yang menyangkut masyarakat, dengan kata yan berbeda pesitipasi adalah bentuk memanusiakan manusia.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Siti Irene, 2011:50) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. (Inu Kencana, 2002:132).

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17)

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Siti Fatimah, 2012:10)

Jenis partisipasi dalam pembangunan menurut Hamijoyo (2007:21)

- a. Desa/Kelurahan merupakan sebuah wilayah yang didiami penduduk yang mempunyai kelompok pemerintah paling bawah, mempunyai otonomi di bawah lurah dan tidak berhak mengadakan pemerintahan rumah tangga sendiri.
- b. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan dalam perencanaan meningkatkan atau memajukan desa.
- c. Partisipasi pemikiran, merupakan sumbangsi buah pikiran atau pemikiran dalam bentuk kegiatan guna kemajuan desa;
- d. Partisipasi tenaga, merupakan bantuan dalam wujud kerja fisik yang diberikan dalam kegiatan guna kemajuan desa;
- e. Partisipasi harta benda, merupakan wujud harta atau fasilitas yang diberikan dalam kegiatan guna kemajuan desa
- f. Partisipasi keterampilan meliputi memberikan dukungan melalui mengajarkan keterampilan yang diketahui.
- g. Partisipasi sosial, merupakan keikutsertaan yang disumbangkan sebagai wujud turut mendukung kemajuan desa

Gordon W. Allport berpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Sedangkan Keith Davis mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam

situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian di atas, partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program. Partisipasi juga berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan pemeriksaan sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama-sama. Secara umum partisipasi dimaknakan sebagai proses stakeholders di dalam mempengaruhi dan membagi kontrol atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi mereka.

Tjokrowinoto (2014:24) mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam keadaan kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Menurut Davis (dalam Sastroepetro, 1986:15) partisipasi adalah keterlibatan mental maupun emosional, ini berarti seseorang memberikan pikiran, perasaan dan aspek kejiwaan, sehingga mampu mengeluarkan tanggung jawab dalam dirinya. Menurut kedua pendapat di atas terlihat bahwa mereka menyoroti partisipasi dengan lebih menekankan pada aspek kejiwaan.

Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa didirikan atas dasar

landasn nilai-nilai yang ideal sebagai: berikut: (a) kemauan yang tumbuh dari dalam diri warga masyarakat /desa secaraotentik agar dapat ikut serta dalam proses politik dan pembangunan. Nilai dapat membedakan antara partisipasi dengan mobilisasi. (b) proses diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan dan pembangunan. (c) peran-peran aktif yang sifat terbuka sehingga menjamin kesetaraan warga masyarakat. (d) Suasana kebersamaan antar warga sebagai rupa utuk menjalin solidaritas sosial Oleh karena itu partisipasi didekatkan dengan kekuatan kebersamaan warga desa, tidakdi batasi pada tingkat peran individual semata-mata tetapi bersifat kolektif. (e) Pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan.

Berdasarkan nilai-nilai di atas mampu di pahami bahwa kesadaran yang lahir dalam diri seorang warga masyarakat adalah merupakan modal yang kuat untuk proses pembangunan, karena kesadaran yang timbul tanpa ada paksaan akan menumbuhkan kepercayaan diri yang menyulitkan seseorang untuk dipengaruhi atau dimobilisasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini jga diharapkan untuk aktifitas pembangunan, yang merupakan yang diinduksi atau diintervensi dari luar baik oleh badan pemerintahan maupun nonpemerintahan. Ada beberapa konsep yang dapat dipelajari agar intervensi dari luar tersebut tidak mematikannya dalam pengambilan keputusan. Dalam kesempatan ini secara garis besar akan dikemukakan konsep yang dikemukakan oleh Biddle dan David Korten. Biddle. Biddle berpendapat, bahwa pembaguanan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mendorong

masyarakat menjadi kompeten dalam menanggapi masalah kehidupannya, serta dalam menganggapi beberapa aspek lokal dan perubahan yang terjadi di sekitarnya (Biddle,1965:780).

## **7. Bentuk Partisipasi**

Bentuk Partisipasi Menurut Kumorotomo (1992:136) adalah secara umum partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu;

- a. Partisipasi dalam penelitian (*electoral participation*). Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu;
- b. Partisipasi kelompok (*group participation*) warga Negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencurahkan aspirasi mereka.
- c. Kontak warga negara dan pemerintah (*citizen government contacting*) proses komunikasi dapat terjalin antar warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga mampu berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa sampai dapat rapat akbar melibatkan seluruh warga;
- d. Keikutsertaan warga negara secara berlanjut dilingkungan pemerintahan. Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga Negara didalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas dapat di lihat bentuk-bentuk partisipasi bagi warga Negara yang diantaranya paling mudah dilihat adalah partisipasi dalam



pemilihan yang ada di desa-desa. Sedangkan Ndraha (1983:125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi yakni:

- a. Partisipasi dalam suatu yang diberiakan tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang mencegah, mengambil dengan syarat serta menerima sepenuhnya;
- b. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan;
- c. Partisipai dalam menerima dan memberi informasi;
- d. Partisipasi dalam proses operasional pembangunan;
- e. Partisipasi dalam menerima *output* pembangunan;

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk partisipasi yang bisa disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa. Terlibatnya masyarakat dalam wujud partisipas yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan. Di dalam rangka pelaksanaan partisipasi, ada beberapa sumbangan yang mampu diberikan masyarakat sebagai sumbangan dalam rangka pencapaian tujuan.

Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Susantyo, 2012:15) mengemukakan pengertian partisipasi dalam hubungannya dengan proses pembangunan, bidang ekonomi khususnya, yaitu:

- a. Keterlibatan dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu

hubungan antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.

- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lainnya.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Menurut Parwoto, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. (Siti Irene, 2011:56)

Partisipasi dalam kehidupan politik menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi. Dalam ukuran moral partisipasi dalam praktiknya sebagai jalan menuju kebebasan dan pengembangan diri. Partisipasi sebagai salah satu dimensi dalam demokrasi juga dikembangkan di dalam lembaga-lembaga sosial dan ekonomi.

Gaventa, Jhon dan Valderma, (2001: 65) mengidentifikasi tiga tradisi konsep partisipasi bila dikaitkan dengan praktis pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.

#### b. Partisipasi politik

Partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan proses politik yang demokratis, yang melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi.

Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi politik yang mengedepankan prinsip perwakilan dan partisipasi tidak langsung.

c. Partisipasi social

Partisipasi sosial lebih berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Partisipasi ini ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang terkait dengan proses pembangunan dalam konsultasi data dan pengambilan keputusan pada semua tahapan siklus proyek pembangunan, dari evaluasi sampai penilaian, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

Beberapa asumsi yang dipakai untuk mendorong partisipasi sosial, yaitu :

- 1) Rakyatlah yang paling tau kebutuhannya, karena rakyat mempunyai hak untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan pembangunan di lokalnya.
- 2) Partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara-suara kelompok yang selama ini dimarjinalkan dalam berbagai aspek pembangunan.
- 3) Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan.

d. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Gaventa, dan Valderrama, Camilio 2001:61 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikut-sertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Dengan demikian, untuk memahami partisipasi masyarakat tidak cukup dengan melihat aktivitas fisik yang terjadi, melainkan juga perlu untuk melihat motivasi, latar belakang dan proses terjadinya aktivitas tersebut. Sebagai sarana identifikasi apakah yang terjadi betul-betul partisipasi ataukah partisipasi semu (*pseudoparticipation*) dapat digunakan kerangka penjelasan yang meliputi yaitu siapa, apa dan bagaimana (Cernea, 2014:501).

- a. Siapa yang berpartisipasi? Apakah seluruh lapisan masyarakat ataukah lapisan-lapisan tertentu saja
- b. Partisipasi bentuk apa? Apakah dalam pengambilan keputusan, tenaga atau bentuk lain
- c. Bagaimana aspek kualitatifnya? Partisipasi sukarela atau paksaan, partisipasi yang terus-menerus atau sewaktu-waktu

Sudah tentu dilihat dari sudut pengembangan kapasitas masyarakat, dari sisi subjeknya bentuk partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dilihat dari prosesnya partisipasi yang dianggap sesuai dengan pengembangan kapasitas masyarakat adalah partisipasi yang meliputi keseluruhan proses pembangunan, sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil. Dengan

demikian, apabila masyarakat ikut menikmati hasil buah pembangunan yang prosesnya dirancang pihak lain, hal itu bukan lcerminan dari kapasitas masyarakat. Pembangunan pada dasarnya buakn hanya dari masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat. Dilihat dari sumber pemicunanya partisipasi ideal adalah yang didorong oleh kesadaran dan determinasi lebih tepat tersebut sebagai mobilitas, yang tidak mecerminkan kabilitas masyarakat.

Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. (Siti Irene, 2011:55)

Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting. Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi. Untuk itu (Cohne, J.M and N.T Uphof. 1977:56) mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang

dan tanggung jawabnya, yaitu :

- a. Penduduk setempat
- b. Pemimpin masyarakat.
- c. Pegawai pemerintahan
- d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu.

Moeljanto menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi lokal, semua mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah:

- a. Berorientasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
- b. Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
- c. Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing – masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
- d. Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan dan bekerja bersama – sama dengan rakyat.

Dimensi dua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini penting diperhatikan terutama untuk mengetahui hal – hal seperti:

- a. Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat.
- b. Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan.
- c. Saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam berisikan individu atau kolektif dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil.
- d. Durasi partisipasi
- e. Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara atau berkelanjutan dan meluas.
- f. Memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan. (Siti Irene, 2011:59)

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan

terhadap program yang ditawarkan.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakatisebelumnya. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yangberwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandaidengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksananakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dariaspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi.
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan denganmasalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuanuntuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yangditetapkan atau ada penyimpangan. (Josef Riwu, 2007:127)

Berdasarkan konsep partisipasi ideal yang sudah diuraikan tadi, bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambung ide perubahandan pertisipasi dala proses pengambilan keputusan menjadi langka awal yan semangat penting dan



akan memengaruhi langkah dan tahap berikutnya. Hal ini menyebabkan karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan melibatkan masyarakat merasa bahwa kegiatan tersebut menjadi miliknya.

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen bangsa, agar masyarakat memiliki rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut suatu bidang kehidupan saja, namun mungkin dilakukan secara simultan terhadap berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan. (Harun, 2011:249).

Macam tipologi partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Partisipasi pasif/manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- b. Partisipasi informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

- c. Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi, tidak ada peluang membuat keputusan bersama, dan profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan (sebagai masukan) atau tindak lanjut.
- d. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
- e. Partisipasi fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- f. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga

memiliki andildalam keseluruhan proses kegiatan.

- g. *Self mobilization* (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambilinisiatif sendiri secara bebas untuk mengubah sistem dan nilai-nilai yangmereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan pihak-pihaklain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yangdiperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdayayang ada dan atau digunakan. (dalam Siti Fatimah, 2012:21)

Partisipasi masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya. Jikadikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat dikaitkan dengan partisipasi sebagaimana dijelaskan oleh Shery Arstein, maka peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan ke dalam anak tangga sebagai berikut :

a. Citizen power

Pada tahap ini terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Tingkatan meliputi kontrol masyarakat, pelimpahan, dan kemitraan.

b. Tokenism

Pada tahap ini hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakatmendengar dan memiliki hak untuk member suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Tingkatan meliputi penetraman, konsultasi, dan informasi.

c. Non participation

Pada tahap ini masyarakat hanya menjadi objek. Tingkatan ini meliputi terapi dan manipulasi.

Berdasarkan anak tangga dapat diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam citizen power, karena dalam konteks inilah terdapat ketelibatan masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat demokratis.

## **8. Partisipasi Masyarakat dan Program Pembangunan**

Menurut Madrie (dalam Tjokrowinoto, 2014), keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut menggunakan hasil dari pembangunan, ikut memperoleh keuntungan dari upaya pembangunan, meliputi pada pembangunan yang dilakukan oleh perkumpulan, instansi pada pembangunan maupun yang dilakukan pemerintah.

Dilihat dari sudut tujuan pembangunan masyarakat yang mengarah pada peningkatan taraf hidup maka sumberdaya pembangunan merupakan faktor yang cukup penting. Hal ini disebabkan agar taraf hidup dapat ditingkatkan diperlukan lebih banyak peluang guna pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. Pada hal sumber daya yang tersedia merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Seberapa jauh efektivitas sumber daya tersebut dalam pemenuhan kebutuhan akan sangat tergantung dari bagaimana memanfaatkannya.

Dalam proses pembangunan masyarakat yang di dalamnya ada unsur perubahan dan pembaharuan, paling tidak ada dua pihak yang berperan. Yang pertama adalah pihak dari luarmasyarakat (komunikasi) yang berfungsi mendorong terjadi perubahan. Dalam pengertian ini salah satunya adalah pihak pemerintah dengan berbagai instansi dan lembaga yang memiliki melalui program-program pembangunan. Yang kedua adalah masyarakat atau komunitas sendiri hal ini di sebabkan oleh karna dalam pembangunan masyarakat, peran, inisiatif, katiitas dan partisipasi dari masyarakat sendiri sangat diharapkan. Dengan adanya dua pihak ini, variasi pendekatan dalam pembangunan termasuk juga dalam ranka pendayagunaan sumber-sumber pembangunan dapat dilihat dari prmosi peranan dar pihak luar komunitas dan dar komunitas sendiri. Variasi tersebut akan membawa konsekuensi an desentralisas, uniormtas atau memerhatikan keanekaragaman, *bottom up* atau *to down*, berorientasi pada manusia atau pada kegiatan menghasilkan dan masih beberapa dikotomi yang lain. Dalam kehidupan manusia di dunia, terdapat jaringan hubungan tak terisahkan antara manusia dengan alam melaluiperilaku manusia (Capra,2004). Sumber daya manusia selain merupakan potensi pembangunan juga sebagai aktor, dengan demikian, mreka akanmerespons potensi yang isediakan alam. Kualitas sumberdaya manusia akan mempengaruhi kemampuan respons tersebut. Kemampuanyang dimaksud bukan hanya keampuan dalam memamfaatkan secara lebih optimal smber daya alam melaikan juga kemampuan memelihara.

Secara konseptual, Daniell Selener (1997) membagi empat jenis kategori partisipatif:

- a. Domestikasi: Kekuasaan dan kontrol terhadap kegiatan tertentu ada di tangan perencana, kepala desa, camat, atau pemerintah yang diraih dengan menggunakan teknik partisipasi semu untuk melakukan manipulasi kegiatan yang menurut anggapan pihak luar penting dan bukannya memberdayakan partisipannya atau masyarakatnya sendiri.
- b. Bantuan: Kekuasaan dan kontrol tetap ada di tangan pihak luar (elit). Para anggota kelompok yang berpartisipasi menerima informasi, nasihat, dan bantuan. Para partisipan diperlakukan sebagai objek pasif yang tidak mampu mengambil peranannya dalam proses kegiatan. Mereka sekedar diberi informasi kegiatan, tetapi tidak mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan dan kontrol.
- c. Kooperasi: Melibatkan masyarakat dalam bekerjasama dengan pihak luar untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau partisipan. Keputusan diambil melalui dialog antara partisipan dan pemimpin. Partisipan juga aktif dalam pelaksanaan. Kekuasaan dan kontrol dipegang bersama selama berlangsungnya kegiatan, yang secara ideal berlangsung dari “bawah ke atas”.
- d. Pemberdayaan: Pendekatan agar masyarakat memegang kekuasaan dan kontrol terhadap program, atau kelembagaan berikut pengambilan keputusan dan kegiatan administrasi. Partisipasi diraih melalui hati nurani, demokratisasi, solidaritas dan kepemimpinan. Partisipasi untuk

pemberdayaan biasanya bercirikan terjadinya proses mandiri dalam perubahan tatanan sosial dan politik.

Secara khusus lagi Peter Oakley mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

*a. Manipulation*

Tingkat paling rendah mendeskripsikan situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.

*b. Consultation*

Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.

*c. Consensus building*

Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok.

*d. Decision-making*

Consensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu.

*e. Risk-taking*

Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi.

*f. Partnership*

Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.

*g. Self-management*

Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian. (Siti Irene, 2011:66)

Partisipasi menurut effendi, terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisitertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. (Siti Irene, 2001:58)

Menurut Keith Davis (dalam Intan dan Mussadun, 2013:34) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa :

- a. Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.



- b. Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c. Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama.
- d. Keahlian, merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan
- e. Barang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

## **9. Konsep Pembangunan**

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk:2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul, 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat, dkk, 2011:3). Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif,

dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tembuh oleh suau negara bangsa menuju modernitas alam rangka pembinaan bangsa (*nation-bulding*)”. Apabila definisikan sederhana di atas disimak secara cermat, akan muncul ke permukaan palin sedikit tujuh pokok.

*Pertama:* pembangunan merupakan suatu proses. Berati pembanguna merupakan rangkaiian kegiatan yang berlansung secara berkelajutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat *independen*akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari suatu bersifat tanpa akhir (*neve ending*). Banyak cara yang dapat digunakan menentukan petahapan tersebut. seperti berdasarkan jangka waktu , biaya, atau hasil tertetu yang diharapkan akan diperoleh.

*Kedua* pembangunan merupakan usaha yang disengaja ditentukan sebagai suatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka lain kehidupan masyarakat, bebangsa, dan benegara terdapat kegiatan yang kelihatanya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak di tetapkan secara sadardan hanya terjadi secara sporedis atau insidental, sebagai tersebut tiak dapat ditegorikan sebagai pembangunan.*Ketiga:* pembangunan dilakukan secara terlenana, baik dari arti terjangka panmjang, jangka sedang, dan jangka pendek. *Keempat:* rencana pembangunan mengundang makna pertumbuhan dan perubahan

Istilah “pembangunan” umumnya di pergunakan dalam bahasa Indonesia, namun saat pembangunandalam suatu perumusan yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan atau fungsi yang sangat beragam yang melekat pada istilah pembangunan itu. Dengan demikian pembangunan meliputi banyak arti, fisik maupun non fisik, pada aspek proses maupun tujuan menurut Rahardjo (dalam Krisnha S. Andini dkk 2014:1).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengemukakan Tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah usaha meningkatkan mutu hidup dan kehidupan sebaik-baiknya, kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan Denis Goulet dikutip dalam Arif (2000:105) mengemukakan mengenai etika dan falsafah pembangunan yang menjelaskan bahwa proses pembangunan akan dihasilkan solidaritas baru yang mengakar ke bawah. Selain itu, pembangunan juga harus menitik beratkan pada aspek beranekaragaman budaya, wilayah, serta menjunjungharkat martabat dan hak manusia dan masyarakat.

Goulet selanjutnya mengemukakan pembangunan merupakan usaha yang akan memunculkan masalah-masalah etis sudah banyak muncul di masyarakat, seperti hakikat dan dasar kehidupan yang lebih baik yaitu keadilan dalam relasi-relasi kemasyarakatan.

Pengertian pembangunan umum pada hakikatnya merupakan proses peningkatan yang berlangsung secara kontinu untuk mencapai kondisi yang lebih baik berdasarkan pada aturan tertentu. Mengenai definisi pembangunan,

beberapa ahli mengemukakan teori yang beragam misalnya mengenai perencanaan.

Siagian (1994) mengemukakan definisi mengenai pembangunan sebagai “upaya atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sengaja oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) mengungkapkan menjadi lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (*development*) merupakan proses perubahan yang meliputi sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan dalam pengertian ekonomi sebenarnya, pembangunan merupakan upaya yang berlanjut yang menimbulkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga meningkat dalam yang cukup lama.(Sukirno, 1995: 13). Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua elemen kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level

makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

a. Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (*extention education*) dan pembangunan masyarakat (*community development*).

Joseph Di Franco (1966) membandingkan dua macam pendekatan secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsip – prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat banyak persamaan dibandingkan perbedaan. Hal tersebut dikarenakan keduanya menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat. Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. Bryant dan White (1987:132), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya.

## **B. Kerangka Pikir**

Dapat dilihat bahwa kepemimpinan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau partisipasi anggota dalam suatu organisasi, karena apabila seorang pemimpin baik dalam menjalankan tugasnya, maka dengan sendirinya anggotanya akan percaya dan rasa simpati akan timbul seiring berjalannya roda organisasi yang semakin baik.

Organisasi yang berjalan dengan baik, otomatis dukungan serta partisipasi masyarakatpun akan semakin tinggi, dan sebaliknya apabila pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka rasa simpati anggota dan tingkat partisipasi anggota akan semakin rendah dikarenakan ketidakpercayaan anggota kepada pemimpinnya.

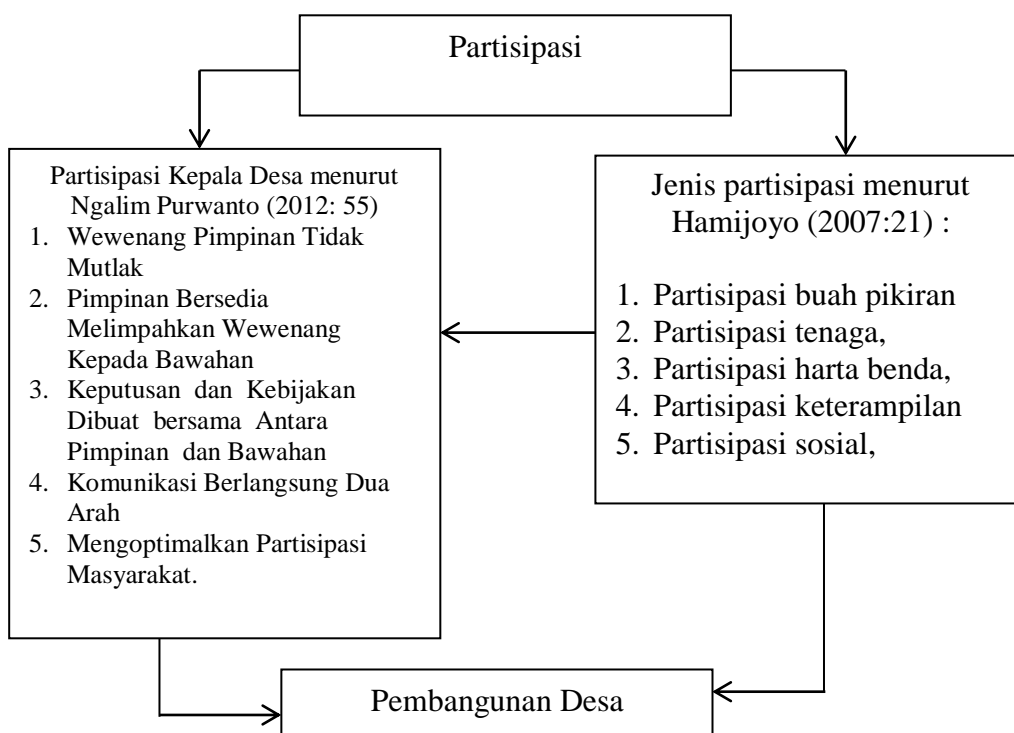
Keberhasilan sebuah desa pada umumnya dipengaruhi oleh gaya cara memimpin yang diterapkan dalam desa tersebut, karena sumber daya manusia dari pemimpin merupakan unsur penting dalam perencanaan, pengorganisasian, arahan dan partisipasi masyarakat maupun bawahan yang terdapat dalam desa tersebut.

Setiap kepala desa mempunyai cara dan kemampuan kompetensi yang berbeda-beda dalam menjalankan kepemimpinannya. Perbedaan tersebut tergantung pada tingkat pendidikan, pemahaman terhadap bawahan, dan situasi serta kondisi yang dihadapinya. Adapun Partisipasi dalam penelitian ini meliputi pada partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam upaya perbaikan desa, partisipasi tenaga, yang disumbangkan untuk perbaikan atau pembangunan desa, partisipasi harta benda, yang diberikan untuk pembangunan, partisipasi

keterampilan, yaitu membantu masyarakat dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas sangat banyak bentuk partisipasi masyarakat yang dapat diberikan untuk desanya, maka sangat dibutuhkan peran serta fungsi Kepala Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa dalam merangsang masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk kemajuan desanya.

### KERANGKA PIKIR PENELITIAN



**Gambar 1: Kerangka Pikir**



### **C. Fokus Penelitian**

- a. Desa/Kelurahan merupakan sebuah wilayah yang didiami penduduk yang mempunyai kelompok pemerintah paling bawah, mempunyai otonomi di bawah lurah dan tidak berhak mengadakan pemerintahan rumah tangga sendiri.
- b. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan dalam perencanaan meningkatkan atau memajukan desa.
- c. Partisipasi pemikiran, merupakan sumbangsi buah pikiran atau pemikiran dalam bentuk kegiatan guna kemajuan desa;
- d. Partisipasi tenaga, merupakan bantuan dalam wujud kerja fisik yang diberikan dalam kegiatan guna kemajuan desa;
- e. Partisipasi harta benda, merupakan wujud harta atau fasilitas yang diberikan dalam kegiatan guna kemajuan desa
- f. Partisipasi keterampilan meliputi memberikan dukungan melalui mengajarkan keterampilan yang diketahui.
- g. Partisipasi sosial, merupakan keikutsertaan yang disumbangkan sebagai wujud turut mendukung kemajuan desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pinrang yaitu tepatnya di Desa Kaseralau Batulappa Kabupaten Pinrang, dengan pertimbangan bahwa Desa Kaseralau Batulappa Kabupaten Pinrang sangat cocok dilakukan penelitian masalah peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan mulai Bulan Februari sampai dengan April 2018.

#### **B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian kasus terkait manusia, sebuah objek, set kondisi, dan sebuah cara berfikir ataupun suatu kejadian pada masa sekarang.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi kualitatif adalah berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Penelitian ini akan membahas mengenai sebuah objek kajian dengan memahami focus dari sebuah fenomena. Peneliti akan meneliti mengenai struktur utama dari objek yang akan diteliti dan menginterpretasikannya berdasarkan informasi dari informan.

### C. Informan Penelitian

Mengetahui penelitian ini bersifat kualitatif, maka yang menjadi informan penulis ialah:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Aparat Desa	2
3	Tokoh Masyarakat	3
	Jumlah	6

### D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data di kemukakan dalam penyusunan proposal, menggunakan teknik:

#### 1. Observasi

Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan kepala desa.

#### 2. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan berhadapan langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan yang terkait dengan objek yang akan diteliti.

#### 3. Dokumen/ Arsip

Dokumen merupakan data yang berbentuk tulisan, dokumentasi gambar, video, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

## **E. Jenis Dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

- a. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk deskripsi kata atau kalimat yang dapat berupa gambaran yang dijadikan dasar dalam memecahkan masalah
- b. Data kuantitatif merupakan data yang tidak berbentuk tulisan atau deskripsi yang kemudian diolah dan dibuatkan interpretasi.

### **2. Sumber Data**

- a. Data primer bersumber dari data hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder bersumber dari bahan buku atau berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang ditemukan, dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menginterpretasikan data yang ditemukan. Teknik analisis data menurut miles dan huberman yang dikutip di Sugiono (2007;49), yaitu;

### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan guna melengkapi dan menyusun hasil penelitian yang bersumber baik dari informan maupun dari kepustakaan.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih tema utama atau inti dari data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya akan disusun menjadi Baris-baris informasi penting hasil penelitian.

## 3. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam Penelitian kualitatif, Penyajian data yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis, makna peristiwanya mudah dipahami.

## 4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing And Verification*)

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat aturan sebab akibat dan beberapa proporsi sehingga dalam menarik kesimpulan dapat di pertanggungjawabkan.

## **G. Pengabsahan Data**

Dalam pengambilan data hasil penelitian untuk menguji keabsahan data maka dilakukan triangulasi. Sugiyono (2012:127), mengemukakan teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai pengumpulan informasi dari sumber informasi yang sudah tersedia sebelumnya. Adapun bagian-bagian triangulasi diuraikan sebagai berikut yaitu:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi merupakan langkah membandingkan data yang didapat dari penelitian, guna mengecek kevalidan data yang ditemukan.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi merupakan tehnik menguji kredibilitas data dengan mengecek

langsung kepada sumber data yang sama melalui cara yang berbeda. Teknik berbeda itu meliputi wawancara yang disesuaikan dengan hasil observasi, dokumentasi maupun kuesioner.

### 3. Trianggulasi Waktu

Waktu pada umumnya mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, maka dilakukan dengan mengecek hasil wawancara, observasi, atau cara lain pada waktu atau kondisi yang tidak sama atau berbeda.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Kasarelau

Desa Kasarelau merupakan salah satu desa dari lima (5) desa yang ada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Desa Kasarelau terdiri atas empat (3) dusun yakni Dusun Kasarelau, Bamba Loka dan Paleleng. Desa Kasarelau adalah desa pertanian dan perkebunana. Berikut deskripsi tentang sejarah Desa Kasarelau.

Tabel 4.1. Perkembangan Desa Kaserakau

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa</b>
<b>1989</b>	Terjadinya pemekaran secara besar-besaran dari desa Letta Kecamatan Lembang sebagai desa Induk menjadi tiga desa yaitu : Desa Letta, Desa Kariango dan Desa Kasarelau.
<b>1989-1992</b>	Kepala Desa Kasarelau yang pertama yaitu : ABD. FATNAN SITTARA dari pegawai Kecamatan Lembang
<b>1992-2000</b>	Kepala Desa yang kedua menjabat di desa Kasarelau yaitu Drs. Muh. AM melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang pertama kalinya dilakukan di Desa Kasarelau.
<b>2000</b>	Berdirinya satu Kecamatan yang baru dan merangkul lima desa dari tiga kecamatan (Kecamatan Duampanua, Patampanua Dan Lembang) yang membuat desa Kasarelau harus keluar sebagai bagian dari Kecamatan lembang dan bergabung dengan Kecamatan baru yaitu Kecamatan Batulappa
<b>2000 - 2006</b>	Drs. Muh. AM kembali menjabat Kepala Desa pada periode selanjutnya. Dan dia menjabat kepala desa selama dua (2) periode
<b>2006 – sampai sekarang</b>	Badaruddin terpilih menjadi Kepala desa Kasarelau yang ke tiga (3) melalui pemilihan langsung.

Sumber: Kantor Desa kasarelau

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

### a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Kaseralau terdiri atas 384 KK dengan total jumlah jiwa 2.054 orang. Berikut persentasi perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Tabel 4.2. Persentase Laki-laki dan perempuan

<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
1.048 Jiwa	1.006 Jiwa	2.54 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Kaseralau

Berdasarkan pada jumlah penduduk, Desa Kasarelau memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.006 jiwa perempuan dan 1.048 laki-laki. Sehingga jumlah total penduduk Desa Kasarelau sebanyak 2.054.

### b. Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di desa Kaseralau.

Tabel 4.3. Perbandingan Jumlah KK dan Pra Sejahtera

<b>Prasejahtera</b>	<b>Sejahtera</b>	<b>Total</b>
116 KK	100 KK	216

Sumber: Kantor Desa Kaseralau

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Kasarelau berdasarkan data dari kantor Desa diperoleh bahwa sebanyak 116 KK masyarakat desa Kasarelau tergolong prasejahtera dan 100 KK tergolong sejahtera. Ini berarti penduduk



desa Kasarelau masih mayoritas hidup dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah kebawah. Desa Kasarelau adalah salah satu desa tertinggal di wilayah kabupaten Pinrang, karena infrastruktur di desa ini belum memadai terutama akses jalan ke desa ini masih jalan tanah maka mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani. Berikut persentase jumlah pekerjaan masyarakat desa Kasarelau.

Tabel 4.4. Persentase Jenis Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Petani	95 %
2	Peternak	30 %
3	Wiraswasta	0.5 %
4	PNS	0.05 %

Sumber: Kantor Desa Kasarelau

Persentasi jenis mata pencaharian di Desa Kasarelau berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas bermata pencaharian adalah petani, selanjutnya peternak dan wiraswasta. Sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat sedikit dengan jumlah 0.05% dari jumlah penduduk yang ada.

#### c. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Desa Kasarelau terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun Kasarelau, Dusun Bamba Loka, dan Dusun Paleleng dengan jumlah Rukun Keluarga (RK) sebanyak enam (6) buah. Berikut daftar nama dusun dan jumlah RK-nya.

Tabel 4.5. Daftar Nama Dusun dan Jumlah RK

No	Nama Dusun	Jumlah RK
1	Bamba Loka	2
2	Kaseralau	3
3	Paleleng	1

Sumber: Kantor Desa Kaseralau

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Kantor Desa Kasarelau diperoleh bahwa jumlah dusun yang terdapat di dalam wilayah desa Kasarelau berjumlah 3 dusun yakni dusun Bamba Loka dengan jumlah rukun keluarga sebanyak 2 Rk, selanjutnya dusun kasarelau dengan rukun keluarga sebanyak 3 Rk, dan yang terakhir adalah dusun Paleleng sebanyak 1 RK.

#### d. Potensi

Didalam menanggulangi kemiskinan yang terdapat dalam desa Kaseralau ada beberapa potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan selain potensi sumber daya manusia, perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan. Maka potensi SDA dan SDM tersebut diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Potensi SDA

Wilayah desa Kaseralau potensi sumber daya alam mayoritas dari sektor pertanian sekitar 80 % adalah pertanian sawah dan 90 % kebun, Pola cocok tanam sawah yaitu 2X setahun untuk dusun Bamba Loka 1 setahun, 1X setahun untuk dusun Kaseralau dan Paleleng dan cocok tanam kebun jagung 2X setahun.

## 2) Potensi SDM

Dengan adanya potensi SDA seperti diatas maka peluang untuk menuntaskan kemiskinan di desa Kaseralau terbuka lebar dan hal ini harus didukung oleh SDM yang memiliki kapasitas oleh karena kami memandang bahwa segala sesuatu terletak pada manusianya itu sendiri maka pengembangan kemampuan kapasitas SDM merupakan prioritas kami dan merupakan bagian strategi dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah desa Kaseralau.

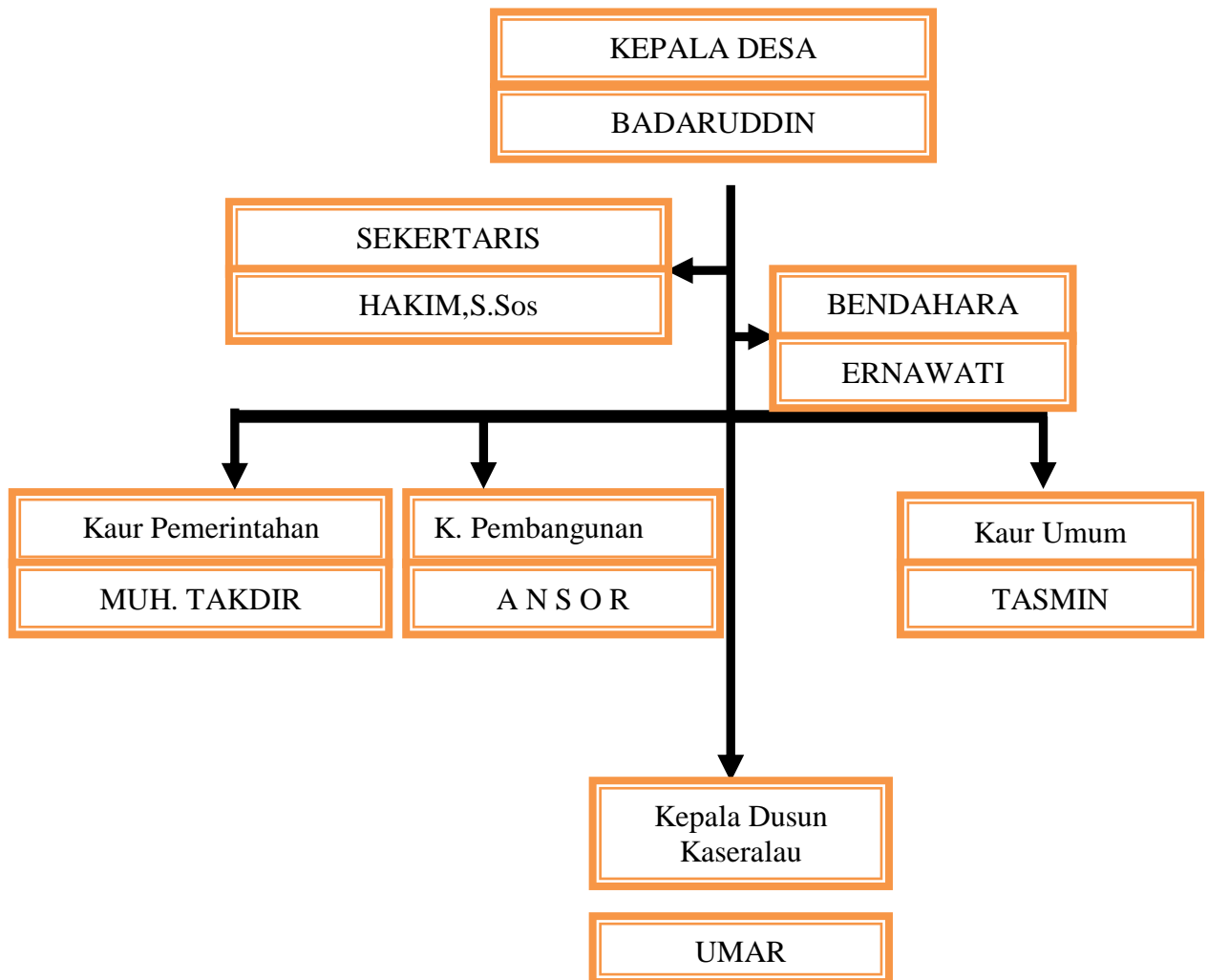
## 3) Potensi Aparat Desa Dan Organisasi Kemasyarakatan

Sebagai bahan dari tugas pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat maka aparat desa juga harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung proses ini berjalan dengan baik di desa Kaseralau, dukungan aparat desa Kaseralau terhadap setiap kegiatan pengentasan kemiskinan sangat besar, ini terlihat pada perhatian dan fasilitasi yang diberikan cukup besar dan menjadi suatu nilai tambah tersendiri dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

Hal yang sama juga diberikan oleh kelompok-kelompok kemasyarakatan yang terbentuk, remaja mesjid, BPD, kelompok tani cukup banyak berpartisipasi di dalam setiap kegiatan yang ada.

## e. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

*Struktur Pemerintahan Desa Kaseralau  
Periode Tahun 2016 s/d 2021  
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*



Gambar 4.1. Bagan struktur Organisasi

Susunan Struktur organisasi Pemerintahan Desa ialah Kepala Desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan, bendahara dan kepala dusun.

## a. Tugas pokok

## 1) Kepala Desa :

- a) Kepala Desa memiliki wewenang melaksanakan system pemerintah,

membangun masyarakat;

- b) Kepala desa menjalankan tugas berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh aparat Desa dan BPD.

2) Sekretaris Desa :

- a) Membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan secara administrasi kepada masyarakat.
- b) Pemerintah Desa dan masyarakat;

3) Kepala Urusan Pemerintahan

- a) Kepala Urusan mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan sesuai dengan urusan yang dibidangnya.
- b) Kasi pembangunan membawahi urusan pendataan penduduk dan mengenai tanah.

4) Bendahara :

- a) Mengatur secara administrasi yang berkaitan dengan keuangan desa
- b) Memberikan laporan kepada kepala desa

5) Kepala Dusun :

- a) Sebagai staf pelaksana tugas kepala desa dalam bagian kerjanya
- b) Melaksanakan pembinaan guna memberdayakan swadaya dan saling membantu dengan masyarakat
- c) Membantu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala des

## **B. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Kasarelau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**

Kepemimpinan kepala desa Kasarelau dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang sangat besar. Dimana setiap program perencanaan untuk desa akan ditangani dan disetujui oleh kepala desa yang selanjutnya akan diajukan kepada pemerintah daerah. Berikut uraian kepemimpinan kepala desa kasarelau dalam pembangunan desa.

### **1. Wewenang Pimpinan Tidak Mutlak**

Wewenang pimpinan kepala desa tidak mutlak dimaksud disini yaitu kepala desa mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Dimana pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis dan memiliki sifat pimpinan tidak mutlak selalu menghargai hak dari anggotanya, sebagai anggota mereka juga harus mendapat perlakuan yang baik dari pemimpin, kebebasan dalam berorganisasi yang biasa di desa yang merupakan tingkatan terendah dari level pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Kasarelau, berpendapat bahwa kepala Desa cukup bijaksana dalam menentukan program-program pembangunan di Desa, khususnya pembangunan sarana fisik jalan dan masjid. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan program tersebut belum dilaksanakan secara adil dan merata. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara dibawah ini :

Kaur Pembangunan, mengatakan:

“beliau Kepala Desa, kalau bisa dibilang bijaksana ya bijaksana, karena beliau selalu mendukung setiap program-program pelaksanaan pembangunan di Desa. Nggak ada yang namanya pilih kasih. Tidak hanya wilayahnya saja yang diutamakan, tetapi selang

seling atau bergantian. Peran serta Kepala Desa terhadap bawahannya dalam masalah pembangunan selalu melibatkan yang berkepentingan dengan pembangunan”.

Salah satu masyarakat mengemukakan pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa pembangunan sarana fisik khususnya jalan di Desa Kasarelau ini belum bagus. Kutipan hasil wawancara yang mendukung pernyataan tersebut adalah:

“Desa Kasarelau ini kan masih banyak jalan yang nggak bagus, jadi untuk berlalu lintas ke arah kecamatan dan pusat perbelanjaan pun masih rusak, maka terkadang untuk berjalan pun terkadang males, belum sesuai lah”.

Menurut peneliti, perbedaan pendapat ini disebabkan karena tingkat kemampuan yang berbeda dalam memahami alasan atau bahan pertimbangan dari pelaksanaan suatu program. Kelancaran suatu pembangunan dipengaruhi oleh semua pihak di desa tersebut, dan salah satu faktor penting adalah gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan tersebut. Dalam program PNPM ini, kepala desa tidak menggunakan kuasanya hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri, pembangunan fisik ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. sebagai pemimpin di desa ini, kepala desa tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan tertentu apalagi jika akan memberikan dampak negatif bagi masyarakatnya.

## **2. Pimpinan Bersedia Melimpahkan Wewenang Kepada Bawahan**

Kepala desa menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sekretaris Desa mengatakan bahwa Kepala Desa mempunyai kemampuan yang luar biasa, karena menurut sekretaris desa, beliau sebagai seorang pemimpin harus melayani siapa saja

yang dipimpinnya tidak pandang bulu, kemampuan memberikan dukungan dan dorongan yang dimiliki Kepala Desa dapat dilihat dari proses penyusunan perencanaan program desa. di Desa biasanya diadakan pelaksanaan Musbangdes, diadakan penyerapan aspirasi masyarakat terlebih dahulu yang dilaksanakan pada masing-masing dusun yang disebut Musbangdes. tidak hanya dusun saja yang Kepala Desa prioritaskan Kepala desa selalu ingin semua persoalan Desa terjalin dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah karena beliau berkeinginan sebagai seorang Kepala Desa harus menjadikan segala hal nya menjadi lebih baik. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa:

“misalkan pak kepala desa mengadakan kumpulan di balai desa untuk membicarakan apa yang akan direncanakan. abis itu setelah semuanya mengikuti musyawarah di desa. Saat Musbangdes, kita ambil prioritas. karena masalah dari tahun ketahun selalu jalan, jadi jalan menjadi prioritas utama, karena jalan menuju ke pemerintah pusat dan daerah. memang masing-masing dikasih kesempatan untuk mengutarakan usulan perencanaannya. Lalu pak Kades berpendapat, ini mana yang lebih penting katanya, jadi masyarakat yang lebih penting yang mana. itu diserahkan ke LPM. Nanti Kades yang menyimpulkan bahwa pembangunan harus difokuskan, gitu”.

Kemudian Kepala Dusun, mengatakan:

“Awalnya diadakan pertemuan untuk membicarakan program di tiap-tiap dusun. Dusun 1 rencananya apa, dusun 2 apa, begitu seterusnya dengan Dusun 6, abis itu, baru diadakan musyawarah untuk membahas perencanaan desa “.



### **3. Keputusan dan Kebijakan Dibuat bersama Antara Pimpinan dan Bawahan**

Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi wilayah, antar ruang dan antar waktu, antar fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Salah satu gaya kepemimpinan yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai keefektifan kepemimpinan kepala desa adalah dalam setiap menjaga antar setiap pemerintah pusat dan daerah dengan baik. misalkan agar selalu tercipta integritas yang baik dan adil antara pusat dan daerah kepala desa selalu merencanakan program yang berasal dari elemen masyarakat. Usulan perencanaan program yang sudah diajukan misalkan dari setiap dusun tidak bisa direalisasikan seluruhnya dalam satu tahun sekali.

Kaur Umum, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditunjuk satu orang yang dianggap mampu untuk bertindak sebagai pemimpin rapat dan mengarahkan ketentuannya. Pemimpin tersebut biasa kepala desa langsung, perwakilan dari BPD, salah satu kepala dusun atau kaurberikut adalah kutipan hasil wawancara:

“Ya kita ngambil suatu apa ya...semacam suatu pimpinan rapat gitu. nggak mesti kepal desa. tapi ya kadang-kadang emang kepala desanya secara langsung. kalau nggak ya kita ngambil atau ngajak dari masing-masing kepala dusun berikut kaur, BPD, dan anggota LPM juga kan ikut, nah itu nanti kita pilih sebagai pimpinan rapat. Dia yang mengarahkan.

Kaur Pembangunan mengatakan :

“Penentuan pembangunan nggak pake suara terbanyak. Misalkan di salah satu dusun mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan. Di dusun yang satu hanya menghubungkan jalan ke pusat saja. dan kalau di susun yang satunya lagi menghubungkan beberapa dusun bahkan antar desa, ya kita lebih pentingkan yang sangat sangat penting.

#### **4. Komunikasi Berlangsung Dua Arah**

Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat. Kemampuan Kepala Desa dalam memimpin dilihat dari keefektifannya. Dalam prosesnya kepala desa selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, sehingga kepala desa selalu mengoptimalkan semua yang menjadi prioritas untuk masyarakatnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa dapat dikatakan bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan pemerintah, pembangunan desa dan keinginan masyarakat desa diambil melalui dengan cara bermusyawarah untuk mufakat, karena dalam prosesnya setiap aspirasi masyarakat adalah kebutuhan yang lebih penting. kemampuan tersebut dapat dilihat dari cara kepala desa dalam menangani setiap permintaan dari masyarakatnya. Kepala Dusun, mengatakan bahwa kepala desaselalu mengoptimalkan segala aspirasi dari masyarakat. berikut adalah kutipan hasil wawancara:

“misalkan ada aspirasi masyarakat yang meminta perbaikan jalan, atau minta bangunan poskesdes, pak kepala desa sebaik mungkin dan sebisa mungkin selalu menuruti apa yang dibutuhkan masyarakat, meskipun itu dengan jangka waktu yang panjang”.

#### **5. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat. Kemampuan Kepala Desadalam memimpin dilihat dari keefektifannya.**

Kepemimpinan Kepala Desa sangat jelas terlihat terhadap suksesnya pembangunan, karena merekalah ujung tombak dalam pembangunan di desa bisa tercapai. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat, perilaku masyarakat, partisipasi masyarakat tersebut akan membawa dampak terjadinya perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup

mereka, pelaksanaan pembangunan Desa akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kepedulian masyarakat sehingga menimbulkan keefektifan dari kepemimpinan Kepala Desa. Berdasarkan wawancara dengan ketua LPM menyampaikan bahwa:

“Kepala desa berkoordinasi aktif dengan saya serta perangkat lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan beliau memiliki semangat kerjasama yang tinggi, beliau selalu mengawal program pemerintahan yang akan dilaksanakan di desa”

Berdasarkan wawancara dan penjelasan di atas kepala desa sudah berperan aktif dan sudah menjamin partisipasi masyarakatnya dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang diadakan yaitu pelaksanaan pembangunan dengan selalu memimpin pelaksanaan, sehingga keefektifannya terlihat.

Agar menjamin pembangunan yang bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara tepat dan terarah. prioritaskan terlebih dahulu pembangunan agar tercipta pengoptimalisasian terhadap pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumberdaya yang ada di desa. Menurut hasil wawancara penulis dengan kaur pembangunan mengatakan sebagai berikut:

“berjalannya pembangunan di desa kasarelau ini dikarenakan warga, aparat, dan kepala desa nya itu sendiri ikut bergabung ikut gotong royong, kami selaku aparat desa menghimbau bagaimana caranya menggunakan SD secara baik efektif dan maju untuk desa kami sendiri, kami memanfaatkan sedikit SD yang tersedia di desa kami, jadi kami selalu berharap agar pembangunan di desa kami ini maju”

Gaya kepemimpinan ini dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh perangkat desa khususnya di Desa Kasarelau ini salah satunya adalah memberikan sebuah

bangunan pos kesehatan seperti poskesdes yang sedikit membantu warga masyarakatnya untuk berobat ke poskesdes tersebut meskipun keadaan di sana belum layak untuk dipergunakan.

Pelayanan tersebut sudah bisa dipergunakan namun belum semua dan sesuai dengan standar yang ada masih adanya sedikit bangunan yang belum terselesaikan dan masih kurang sedikit bersosialisasi tentang adanya poskesdes tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, diungkapkan pula oleh kaur pemerintahan:

“iya memang benar, saya selaku aparat di Desa ini kalau masalah pelayanan dan pembangunan poskesdes di Desa kasarelaui belum semuanya berjalan dengan sempurna, dikarenakan bahwa kami sedikit mengalami masalah biaya. tapi kami selalu memprioritaskan kebutuhan warga kami sendiri”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dusun berkata:

“untuk tempat pelayanan poskesdes di Desa memang semuanya benar belum berjalan dengan sempurna kami masih banyak kekurangan. Tapi dengan adanya poskesdes dan bidan desa di Desa kami agar sedikit mempermudah warga kami untuk berobat jika sudah benar-benar tidak bisa untuk berobat ketempat yang lebih jauh”.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**

Kepala desa merupakan pemimpin yang disegani oleh masyarakat dan sangat memiliki pengaruh yang kuat di desa. Kepala desa dapat menjadi pendorong, pemberi motivasi, pengayom, pemberi bimbingan khususnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

Oleh sebab itu kepala desa dapat diberikan tanggungjawab dalam menggerakkan keikutsertaan penduduk desa pada pelaksanaan pembangunan

di Desa Kaseralau. Untuk mengetahui peran gaya kepemimpinan dari Kepala Desa Kaseralau dapat dilihat dari hasil penelitian dibawah ini :

#### 1. Partisipasi Masyarakat dalam aspek Partisipasi Buah Pikiran Masyarakat

Partisipasi buah pikiran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah partisipasi dalam menyumbangkan ide atau masukan kepada pembangunan desa. Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang informan yakni aparat desa mengenai bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam melibatkan masyarakat, beliau menjelaskan mengenai kesempatan yang diberikan kepada Desa kepada warga bahwa:

“kepala desa Kasarelau senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, apalagi jika dalam hal menyumbangkan ide mengenai pembangunan desa”. (Wawancara dengan MT,)

Seperti yang dijelaskan salah seorang informan yang memberikan informasi mengenai kesempatan yang diberikan oleh kepala desa kepada masyarakat dalam pembangunan desa seperti, masukan dan gagasan untuk kemajuan desa hanya kadang-kadang saja. Berdasarkan pada penjelasan informan awal, selanjutnya informan yang merupakan tokoh masyarakat memberikan penjelasan bahwa:

“kepala desa bukannya tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat agar berpartisipasi menyumbangkan ide pada pembangunan desa tetapi karena kepala desa menerima tetapi memnampung ide terlebih dahulu dari masyarakat, sehingga terkadang masyarakat menilai bahwa tidak diberikan kesempatan”. (Wawancara dengan AN, )

Gagasan atau masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada kepala desa mengenai pembangunan desa, disimpan terlebih dahulu, selanjutnya baru

disesuaikan apakah cocok digunakan atau tidak. Hal yang seperti inilah yang membuat masyarakat banyak salah paham, sehingga banyak yang enggan datang saat diundang mengikuti rapat desa. Bentuk partisipasi dari masyarakat desa Kasarelau jika dilihat dari teori-teori yang ada tentunya berbeda jauh dari yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa setempat, beliau mengatakan bahwa :

”semua program dari pemerintah pusat maupun Kabupaten yang di anggap penting untuk masyarakat, tentunya selalu disampaikan akan tetapi jika respon dari masyarakat tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah maka pemerintah tidak dapat memaksakan harus demikian. Contohnya saja ketika dihimbau kepada masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, masyarakat pada umumnya malas untuk mengikuti kegiatan tersebut, akan tetapi ketika ada keperluan yang dibutuhkan kepada pemerintah masyarakat justru mendesak pemerintah untuk membantu. Artinya tidak ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.”(Wawancara dengan BD,)

Partisipasi masyarakat di desa Kasarelau dianggap kurang karena kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih sangat kurang. Hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“masyarakat disini memang jika dihimbau untuk melaksanakan kegiatan yang mengedepankan kepentingan bersama, adakalanya masyarakat bersikap kurang peduli atau masa bodoh. Masyarakat berfikir bahwa ketika mereka bekerja harus mendapat imbalan. Yang sebenarnya kegiatan ini merupakan kepentingan bersama.”(Wawancara dengan TM,)

Masyarakat pada umumnya kurang peduli dengan lingkungan yang ada. Mereka belum memahami pentingnya hidup bergotong royong. Melihat kondisi yang ada peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, MT mengatakan :

“saya juga salah satu dari masyarakat yang jarang mengikuti kegiatan atau kurang berpartisipasi. Karena dengankesibukan saya jarang mengikuti kegiatan kerja bakti. Bukan saja hanya itu, kami juga terlambat menerima penyampaian ketika akan diadakan kerja bakti. pemberitahuan kami terima pada saat waktu pelaksanaan.”(Wawancara dengan MT,)

Disini komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat kurang baik dan menimbulkan masyarakat kurang berpartisipasi. Selanjutnya pendapat seorang Aparat Desa, mengatakan bahwa:

“kadang ketika kami menyampaikan akan ada kerja bakti masyarakat menerima penyampaian kami tetapi saat pelaksanaan mereka tidak datang. Itu membuat kami malas melayani mereka. Karena mereka hanya saat perlu datang kepada kami sedangkan saat diminta untuk ikut berpartisipasi, mereka justru tidak mau.”(Wawancara dengan HK,)

Ketidak seimbangan ini merupakan hambatan dari pemerintah untuk melaksanakan program- program yang disepakati untuk dilaksanakan. Kepala Desa mengatakan:

“kalau dilihat dari presentase kehadiran saja sudah jelas bahwa partisipasi dalam menunjang pembangunan untuk desa sanga- sangat kurang. Masyarakat sangat malas bekerja, mereka hanya mau mementingkan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Masyarakat di desa ini sudah hampir sama dengan masyarakat yang ada diperkotaan, hanya namanya saja desa tetapi tingkah lakuseperti dikota- kota yang hanya mementingkan kepentingan masing- masing.”(Wawancara dengan MD,)

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat adalah hal yang harus bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya partisipasi masyarakatmerupakansuatu upaya guna membangkitkan keinginan penduduk desa agar ikut serta atau terlibat, dengan demikian proses pembangunan dapat meringankan beban dan terlebih dapat dirasakan secara

adil dan sejahtera. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh sekretaris desa HK yang mengatakan:

“kami mengundang tidak semua masyarakat ketika akan diadakan rapat seperti musyawara kami mengundang perwakilan setiap elemen masyarakat atau hanya utusan, tetapi respon dari masyarakat yang kami undang tidak sesuai harapan. Ketika akan diadakan rapat selanjutnya kami mengganti masyarakat yang lain tetapi kendalanya mereka hanya duduk diam dengar tidak menyampaikan sesuatu atau ide-ide yang menunjang proses pembangunan.(Wawancara dengan BD,)

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah keinginan dalam hal memajukan dan melaksanakan setiap rencana kemajuan desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memberatkan diri sendiri. Oleh sebab itu dalam partisipasi Non Fisik masyarakat sangat mendasar terutama saat dalam tahap merencanakan dan mengambil kebijakan. Karena keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan akan berkaitan dengan putusan-putusan yaitu melalui tahapan pengambilan putusan. Pada tahap tertentu sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dengan ide-ide atau pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

Partisipasi Non Fisik yaitu bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pemikirannya terhadap proses pembangunan dan dapat diwujudkan lewat pertemuan/rapat, atau melalui surat saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan seperti system cepat yang dapat digunakan agar pembangunan desa bisa lebih cepat atau sumbangsi saran mengenai potensi yang dapat dikembangkan di desa dengan menggunakan ketersediaan SDA.



Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap beberapa informan maka diketahui rata-rata informan menyatakan kurang aktif dalam mengikuti rapat dan memberikan saran serta masukan. Adapun penyebabnya karena pemerintah desa jarang sekali mengundang. Selain itu masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara didepan umum untuk menyampaikan usulan ide- ide pemikiran.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam aspek Partisipasi Tenaga

Salah satu bentuk keikutsertaan dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau dengan memberikan tenaga. Sebagaimana diketahui dalam masyarakat tidak semua yang berpartisipasi secara penuh, karena adanya berbagai kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HK, beliau mengatakan bahwa:

“ketika akan diadakan kerja bakti masyarakat yang terkumpul hanya sedikit, padahal kepala jaga sudah mengunjungi rumah masyarakat untuk menyampaikan ada kerja bakti dan mereka juga menyampaikan kepada kepala jaga akan ikut tetapi kenyataanya mereka tidak hadir.”(Wawancara dengan HK,)

Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang informan yakni aparat desa mengenai bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam melibatkan masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“selaku pemimpin desa yang disegani dan dihormati oleh masyarakat seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kepala desa untuk turut berperan menggerakkan masyarakat sehingga kepala

desa tidak hanya disebut kepala pemerintahan yang hanya tahu memerintah melainkan dapat langsung memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa diperhatikan. Akan tetapi jika dilihat saat ini, kepala desa hanya mengandalkan para kepala jaga saja apabila akan diadakan kerja bakti dan lain-lain, kepala jaga yang dituntut untuk mengumpulkan masyarakat untuk kerja bakti".(Wawancara dengan AN,)

Partipasi Fisik atau sumbangan tenaga sebagaimana dimaksud adalah bagaimana masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan, melalui program-program yang lakukan seperti membersihkan saluran air, memperbaiki jalan dan jembatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung.

### 3. Partisipasi Masyarakat dalam aspek Partisipasi Harta Benda

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, namun hal yang penting untuk dilakukan yaitu sumbangan dalam bentuk materi (barang). Tingkat keterlibatan penduduk desa berupa materi berada dalam kategori rendah karena masyarakat lebih kepada uang. Karenamenurut responden mengatakan bahwa menyumbang berupa materi menyita waktu dan tenaga. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan salah seorang informan mengatakan bahwa:

"masyarakat jarang dan bahkan belum pernah menyumbang dalam bentuk materi, yang biasa masyarakat menyumbang dalam bentuk uang seperti ketika mereka ada kesibukan lain, mereka memberikan sedikit uang untuk dibelikan aqua, rokok dll untuk yang bekerja, tetapi itu pun hanya masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memberi sedangkan yang lain masa bodoh dengan hal itu."(Wawancara dengan MT,)

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal harta benda dikarenakan kondisi masyarakat di Desa Kasarelau memang cukup dibawah rata-rata atau cukup miskin. Berdasarkan pada data dari desa yang diperoleh bahwa masalah

penyebab kemiskinan di Desa Kaseralauyang berdasar pada hasil gagasan dari tiap wilayah dusun, kondisi social ekonomi masyarakat tiap dusun sangat berbeda. Penyebab kemiskinan secara umum setelah diidentifikasi dapat dibagi kedalam beberapa bidang sebagai berikut :

a. Bidang Ekonomi

Secara umum warga yang tergolong dalam kategori masyarakat miskin di kelurahan Kaseralau dari segi bidang ekonomi diidentifikasi :

- 1) Keterampilan dan pengetahuan kurang yang dibarengi oleh rendahnya SDM atau latar belakang pendidikan minim.
- 2) Kurang memiliki asset yang dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan keluarga (modal).
- 3) Kurangnya kepedulian pemerintah tentang masalah pertanian/perkebunan di desa.

b. Bidang Sosial

Lunturnya nilai-nilai sosial di masyarakat yang kemudian menyebabkan interaksi sosial antar berbagai lapisan masyarakat kurang harmonis. Kondisi semacam ini menyebabkan masyarakat miskin sebagai masyarakat paling bawah menjadi korban

Dua sektor yang menjadi pokok permasalahan kemiskinan di desa Kaseralau yaitu :

a. Sektor Kesehatan

Masih rendahnya kualitas kesehatan KK miskin seperti; balita dan ibu hamil kurang gizi, yang diidentifikasi disebabkan oleh :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan
- 2) Kurangnya informasi bagi masyarakat miskin tentang program-program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah dan kurang dipahaminya prosedur akses keprogram yang ada.
- 3) Kurangnya kepedulian masyarakat tentang masalah posyandu sehingga kebanyakan anak balita tidak lengkap imunisasinya.

b. Sektor Pendidikan

Karena kondisi ekonomi menyebabkan orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya dan juga menyebabkan rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga tingginya angka anak putus sekolah bahkan tidak pernah sekolah cukup tinggi, hal-hal ini jika berlanjut akan menjadi generasi miskin dimasa yang akan datang.

c. Bidang Lingkungan

Lingkungan pemukiman desa Kaseralau masih banyak yang tidak memenuhi standar kelayakan fasilitas pendukung yang sangat minim (Akses jalan, drainase, fasilitas air minum dan tempat pengolahan sampah).

Meskipun demikian bahwa Desa Kaseralau termasuk desa yang cukup belumberkembang dengan baik namun didesa tersebut juga terdapat program-program pemberdayaan masyarakat yang sebagian besar dari PNPM dan dari pihak swasta. Seperti yang di informasikan oleh salah satu informan bahwa:

“pelaksanaan yang dilakukan oleh PNPM, banyak melibatkan masyarakat desa, dimana kami dilibatkan sebagai pihak pelaksana dankepala desa sebagai penanggungjawab pelaporannya nanti.”

Informasi yang hampir sama dari informan menjelaskan bahwa:

“memang benar kami semua yang ingin terlibat dalam pembangunan, karena yang tahu persis kondisi desa kami kan masyarakatnya sendiri. Kepala desa juga banyak mengarahkan dalam proses pembangunannya itu sendiri sebagai kepala desa yang bertanggungjawab dan mengawasi kami.”

Program pemberdayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan di desa ini mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda.

“adanya pembangunan ini sangat membantu kami, apalagi dibidang pengairan.. ini berkat bantuan kepala desa yang memimpin secara demokratis, sehingga memberikan peluang kepada kami untuk mengutarakan apa yang dibutuhkan kebanyakan oleh masyarakat desa.”

Sikap telaten dan menjadi contoh merupakan salah satu bagian penting yang ikut menentukan keberhasilan seseorang dalam memimpin dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan dan orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa. Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa.

“sikap kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dirasakan sudah sangat membantu. Kepala desa banyak memberikan bantuan berupa pembinaan mengenai peningkatan desa dan potensi desa serta kepala desa juga banyak memberikan kami saran dalam bertani.”

Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik bagi perangkat maupun masyarakat. Tujuannya ialah agar aparat desa bersama dengan masyarakat tau dan memahami hal-hal yang harus diselesaikan agar memunculkan keinginan untuk ikut berpartisipasi

dalam setiap rencana pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal yang memang sudah dari dulu dianut oleh masyarakat desa seperti semangat gotong royong yang saat ini mulai terkikis dengan budaya luar yang hanya mementingkan diri sendiri, dan itu patut untuk ditumbuhkan kembali.

Selain itu, Kepala Desa Kaseralau juga membina kehidupan masyarakatnya tidak hanya melalui kegiatan formal tetapi juga melalui kegiatan nonformal. Kepala desa harus lebih sering mengajak warganya untuk berdialog dan berbincang-bincang secara terbuka. Hal ini lebih bersifat penjelasan mengenai makna serta maksud dan tujuan bahkan manfaat dari pemberdayaan itu sendiri.

“adanya sikap toleransi dan demokratis yang diterapkan oleh kepala desa selama menjabat, dirasakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut terlihat ketika kepala desa pembangunan irigasi yang bantuannya dari PNPM, masyarakat desa banyak yang ikut terlibat langsung.”

Partisipasi dalam pembangunan merupakan sebuah usaha untuk memajukan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan potensi yang dimiliki oleh desa didasarkan dalam setiap musyawarah. Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa dilaksanakan melalui musyawarah. Kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan bawahannya, dan juga terhadap atasannya seperti lurah dan pemimpin daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah tujuan dan objek sekaligus pelaksana program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat di setiap pembangunan merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dirumuskan kesimpulan yang diuraikan yaitu:

Kepemimpinan kepala desa Kasarelau dirasakan cukup baik, dimana kepala desa banyak menggunakan kepemimpinan demokratis. Berbagai pembinaan dan saran senantiasa diberikan kepada masyarakat. Selain itu sikap demokratis kepala desa dirasakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Adapun Bentuk partisipasi merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap proses pembangunan yang ditunjukkan melalui partisipasi oleh masyarakat. Tetapi masyarakat masih sedikit yang peduli dengan sekitarnya bahkan masyarakat tidak tergerak untuk terlibat pada pembangunan di desa. Sehingga masyarakat jarang terlibat dalam kegiatan seperti musyawarah.

#### **B. Saran**

1. Kepala desa sebaiknya mengikutsertakan penduduk pada perumusan program pembangunan sehingga masyarakat merasa mempunyai hak berpartisipasi pada kegiatan pembangunan desa.
2. Aparat desa sebaiknya lebih menyatu dan bergaul dengan masyarakat untuk mencari tahu kendala dan keinginan dari masyarakat.

3. Kepala desa sebaiknya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sehingga kepedulian masyarakat akan lingkungan dapat timbul lewat kesadaran masing-masing. Dengan begitu pembangunan di desa cepat terselesaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI.
- Alejandro, Portes (1976. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Ashar Prawitno. 2012. Ilmu dan Seni Kepemimpinan. Jakarta: Mitra. Wacana
- Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini dkk,2014. Pembangunan berbasis masyarakat,ALFABETA, Bandung
- Biddle,1965, Community Development, New York : The Rediscovery of Local.
- Bryant dan White. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara. Berkembang. Jakarta : LP3ES
- Cernea, Michael M. 2. Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan:Variabel-variabel Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan (terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Cohen, J,M, and N.T. Uphof.1977. Rural Develment Participation. New york : Ithaca
- Danim, Sudarwan. 2014. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta : Rineka Cipta
- Deddy T. Tikson. 2005. Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. <http://ecozon.html>
- Dewi Andini, dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal. Pekanbaru. Melalui: <<http://www.jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal-ekonomi/article/view/62/58>>
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- E.Mulyasa. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Gaventa, Jhon dan Valderrama, Comilio. 2001. Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah sebagai pengantar buku Menujudan partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21, yang di terbitkan oleh The British Council dan New Economics Foundation
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadari Nawawi, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Komptitif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamijoyo. 2007. Partisipasi dalam Pembangunan. Jakarta :Depdikbud RI.
- Hastono. 2001. Analisis Data. Universitas Indonesia. Jakarta
- Hasibuan. Malayu. 2004. Manajemen. Edisi II BPFE UGM. Yogyakarta.
- Inu Kencana, 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Intan dan Mussadun. 2013. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lingkungan mangrove di desa bedono, kecamatan sayung.
- Josef Riwu, 2007, Prospek Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Kartono, Kartini. 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pres
- Koentjaraningrat, 1967. Beberapa Antropologi Sosial. Jakarta : Dian Rakyat
- Kumorotomo, W. 1992. Etika Administrasi Negara. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Michael P Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta, Gramedia.
- Ndraha, Talizidhuhu. 1983 Pembangunan masyarakat desa. Jakarta : Rireba Cipta
- Ngalim Purwanto. 2012. Administrasi dan Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pratikno, 2002, Komunikasi pembangunan, Bandung. PT. Alumni
- Rivai, Veithzal. 2003 Kepemimpinan dan perilaku Organisasi. Jakarta : RajawaliPress
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan. Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rnald Lippit dan Ralp K, White Soekarso 2010, dalam studinya berpendapat dan mengemukakan adanya iga gaya kepemimpinan : otoriter, otokrati, diktotar
- Sastropetro, Santoso. 1986. Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Siagian P. Sondang ,1985 Filsafat Administrasi. Jakarta : Gunung Agung.
- , 1999. Teori dan Praktek Kepemimpinan Edisi . Jakarta:Rineka Cipta.
- Siti Fatimah. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. 2011. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali
- Subandi. 2011. Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, 1995, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua, Jakarta, Penerbit : PT. Karya Grafindo
- Susantyo, 2012, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan. Pustaka LP3ES
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003.“Inovasi, Partisipasi dan Good governance”. Bandung: Yayasan. Obor Indonesia
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2014. Pembangunan Dilema dan Tantangan.Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Yukl A. Gary, 1998, Kepemimpinan Dalam Organisasi. Jakarta. PT. Rineka Cipta

